**ANALISA INFRASTRUKTUR TAHUN 2013 – 2018**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB**

1. **Pendahuluan**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

* 1. Urusan Pekerjaan Umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya (Perkotaan dan Perdesaan, Air minum, Air limbah, Persampahan, Drainase, bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi;
  2. Urusan Penataan Ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi;

Sesuai dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

* 1. **Tugas dan Fungsi Organisasi SKPD**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kedudukan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kepala Bidang Tata Ruang, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada DPUPR Provinsi NTB terdapat 6 (enam) UPTD yaitu : 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok, 2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa, 3) Balai Informasi Infrastruktur Wilayah, 4) Balai Pengujian Material Konstruksi, 5) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok, 6) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi - fungsi :

1. Sekretariat; Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan, Pemograman dan anggaran di Lingkup PUPR;
2. Sumber Daya Air;
   1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah skala kewenangan Provinsi;
   2. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air dan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
   3. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air provinsi dan atau pada wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
   4. Pembentukan Dewan Air Provinsi;
   5. Penetapan dan pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
   6. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota dan pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten / kota;
   7. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
   8. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten / kota;
3. Bina Marga
   1. Pengaturan jalan dan jembatan provinsi meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan;
   2. Penetapan fungsi jalan dan jembatan yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten, antar kabupaten / kota, penetapan status jalan dan jembatan dan penyusunan perencanaan umum pembiayaan jaringan jalan provinsi;
   3. Pembinaan jalan dan jembatan provinsi, fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten / kota dan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan jembatan;
   4. Pembangunan dan pengawasan  jalan dan jembatan provinsi.
4. Cipta Karya
   1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan kabupaten / kota;
   2. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana jangka panjang dan menengah;
   3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
   4. Pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan dan air bersih;
   5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
   6. Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan drainase.
5. Tata Ruang
   1. Penyusunan dan penetapan rencana kawasan strategis, rencana detail tata ruang;
   2. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
   3. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten / Kota;
   4. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan ruang;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan;
7. Pelaksanaan pengujian material dan konstruksi;
8. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
9. Pelaksanaan kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Adapun peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

1. Bidang Sumber Daya Air, berperan melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, dengan tiga pilar pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
2. Bidang Bina Marga, berperan untuk melaksanaan pengelolaan jalan dan jembatan yang berstatus Jalan dan Jembatan Provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di Provinsi NTB;
3. Bidang Cipta Karya, berperan melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi : (1) Air Minum, (2) Air Limbah, (3) Persampahan, (4) Drainase, dan (5) Penataan Bangunan dan Lingkungan. Khusus bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan pada bidang ini merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten / kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melaksanakan tugas - tugas TURBINWAS dan yang bersifat *concurrent* atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah serta Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk kesepakatan pelaksanaan program kegiatannya dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah yang merupakan kesepakatan bersama antar pemerintah;
4. Bidang Penataan Ruang, berperan untuk menyusun perencanaan tata ruang skala provinsi, serta melakukan pemanfaatan dan pengendalian atas rencana tata ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
5. Bidang Bina Jasa Konstruksi, berperan melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
6. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah, berperan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan keterpaduan infrastruktur antar kawasan, sektor dan antar wilayah.
   1. **Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan SKPD**

Landasan hukum pelaksanaan APBD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah disempurnakan menjadi Perpres 70 tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. **Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicapai dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi NTB khususnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor, maka secara umum strategi yang ditempuh adalah melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dengan fokus pada percepatan penanganan jalan nasional dan jalan provinsi serta percepatan penyediaan air irigasi dan air bersih. Secara rinci strategi dan arah kebijakan pembangunan yang ditempuh sebagai berikut.

Tabel 2.1.

Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Dinas PUPR Provinsi NTB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Tujuan** | | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| **Misi 1** | | | |
| Mewujudkan pelaksanaan tugas bidang ke-PU-an yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif, demokratis serta berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat | | | |
| 1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik | Meningkatkan upaya pelayanan administrasi perkantoran |
| 2. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan arana aparatur | Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan pra-sarana aparatur | Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan pra-sarana aparatur | Meningkatkan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur |
| 3. Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Meningkatnya hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Pelaporan hasil capaian kinerja dan keuangan yang lebih baik. | Meningkatkan upaya pelaporan capaian kinerja & keuangan |
| **Misi 2** | | | |
| Melaksanakan percepatan penataan ruang kawasan strategis provinsi untuk Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berkelanjutan | | | |
| 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kws Strategis Provinsi yg mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi prog-ram pembangunan daerah | Tersedianya rencana tata ruang pada kawasan Strategis Provinsi | Pembuatan RTR pada kawasan Strategis Provinsi | Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan |
| 2. Meningkatkan kualitas peman-faatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang | Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang , melalui dukungan SIPR & monitoring penataan ruang di daerah utk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah & antar pemangku kepentingan | Peningkatan pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang | Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah. |
| 3. Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang | Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Per-aturan Zonasi, Perijinan, pem-berian insentif serta pengenaan sanksi | pengendalian pemanfaatan ruangmelalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi | Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang |
| **Misi 3** | | | |
| Mewujudkan pembangunan infrastruktur terpadu berbasis kawasan strategis dalam pengembangan wilayah | | | |
| 1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berfokus pada keterpaduan konektivitas kawasan | Tersedianya rencana keterpaduan infrastruktur pada kawasan strategis dan konektivitas wilayah | Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan melalui keterpaduan infrastruktur kawasan strategis | Sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar kawasan dalam pengembangan wilayah |
| 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur antar sektor | Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran infrastruktur antar sektor | Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan melalui keterpaduan program kegi-atan antar sektor pada kawasan strategis | Sinkronisasi program kegiatan antar sektor (multi tahun, multi dana, multi stakeholders) |
| 3. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dalam pengembangan wilayah | Meningkatnya keterpaduan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah | Penyusunan keterpaduan infrastruktur berbasis pengembangan kawasan strategis | Sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah |
| **Misi 4** | | | |
| Mewujudkan sarana dan prasarana SDA yang mantap dan berfungsi maksimal serta mengurangi resiko daya rusak air. | | | |
| 1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa | Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa, | Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi | Melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan |
| 2. Meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air | Meningkatnya ketersediaan air baku | Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenu-han kebutuhan air baku | Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber daya air |
| 3. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air | Meningkatnya kualitas pengendalian banjir | Pengendalian daya rusak air untuk menang-gulangi dan memulihkan kualita sungai yg disebabkan oleh daya rusak air | Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air |
| 4. Meningkatkan keandalan sistem informasi SDA | Meningkatkan ketersediaan dan layanan informasi SDA | Pendayagunaan SISDA untuk mendukung perencanaan pembangunan sarana dan prasarana SDA | Meningkatkan kualitas perencanaan sarana dan prasarana yang mantap melalui pendayagunaan informasi SDA |
| 5. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air | Meningkatnya kualitas pengendalian banjir | Pengendalian daya rusak air untuk menang-gulangi dan memulihkan kualita sungai yg disebabkan oleh daya rusak air | Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air |
| **Misi 5** | | | |
| Mempertahankan kondisi prasarana jalan yang mantap dan berfungsi maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat | | | |
| 1. Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan | Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap | Penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap | Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun |
| **Misi 6** | | | |
| Melaksanakan pembangunan infrastruktur bidang lingkungan permukiman dalam rangka penanganan kawasan strategis serta pemenuhan sasaran MDG's dan SPM | | | |
| 1. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase, persampahan, jalan lingkungan, dan penataan bangunan dan lingkungan). | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas | peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum | Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum. |
| Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah, yang memadai baik kuantitas dan kualitas | Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah |
|  | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan, yang memadai baik kuantitas dan kualitas | Peningkatan ketersediaan infrastruktur persampahan | Meningkatkan peranserta seluruh *stakeholders* dalam upaya mencapai |
|  | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan | Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan | Meningkatkan peranserta seluruh *stakeholders* dalam upaya mendukung aksebilitas pembangunan kawasan perkotaan |
|  | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan | Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan | Meningkatkan peranserta seluruh *stakeholders* dalam upaya mendukung aksebilitas pembangunan kawasan perkotaan |
|  | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan cepat tumbuh | Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan cepat tumbuh | Meningkatkan peranserta seluruh *stakeholders* dalam upaya mendukung aksebilitas pembangunan kawasan cepat tumbuh |
|  | Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan | Pengurangan jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase | Meningkatkan peranserta seluruh *stakeholders* dalam upaya mengurangi titik genangan air |
| **Misi 7** | | | |
| Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang | | | |
| 1. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan. | Meningkaatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas. | Peningkatan pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas | Meningkatkan turbinwas usaha konstruksi daerah yang kompetitif, profesional dan berdaya |
| **Misi 8** | | | |
| Meningkatkan profesionalisme dan independensi pengawasan mutu infrastruktur (*Quality Assurance)* | | | |
| 1. Memberikan pelayanan jasa laboratorium kualitas air dan mekanika tanah dan bahan bangunan. | Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pela-yanan yang memenuhi Stan-dard/Baku mutu | Pemberian pelayanan jasa labotrartorium kualitas air dan mekanika tanah dan bahan bangunan yang memenuhi Stan-dard/Baku mutu. | Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium kualitas air dan mekanika tanah dan bahan bangunan yang memenuhi Stan-dard/Baku mutu. |

*Sumber : Renstra, DPUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2018*

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka kebijakan pembangunan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Kebijakan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Provinsi NTB

|  |  |
| --- | --- |
| **Kebijakan** | **Fokus** |
| 1. Membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur jalan, sumber daya air dan air minum | 1. Membangun dan meningkatkan prasarana jalan untuk melayani kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh dan kawasan tertinggal/terisolir 2. Membangun dan memelihara infrastruktur pengairan dalam skala kecil maupun skala besar 3. Mewujudkan ketersediaan air dan pemerataan pelayanan alokasi kebutuhan air multi sector (memalui konservasi dan pendayagunaan sumber air serta pengendalian daya rusak air) 4. Melaksanakan perbaikan/peningkatan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan |
| 1. Mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh (Strategis Provinsi) | 1. Melaksanakan penyusunan rinci kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi 2. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan 3. Mengembangkan kawasan khusus baru (pusat pemerintahan) |

*Sumber : Renstra, DPUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2018*

1. **Program dan Kegiatan Prioritas**

Penyusunan program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur strategis guna menurunkan kesenjangan menuju keseimbangan pembangunan antar wilayah dan sektor dilakukan dengan menetapkan program pembangunan unggulan dan kegiatan pembangunan prioritas sebagai terobosan dalam mewujudkan NTB Bersaing yang diharapkan dapat memiliki daya ungkit utama terhadap hasil dan manfaat dari program dan lainnya yang secara rutin dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaaan Umum Provinsi NTB. Prioritas pembangunan tahun 2013-2018 sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2013-2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Program Unggulan** | **Kegiatan Prioritas** |
| 1 | Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan | * Pembangunan/peningkatan Jalan * Pembangunan/peningkatan jembatan |
| 2 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | * Rehabilitasi jalan dan jembatan * Pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan |
| 3 | Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | * Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi * Rehabilitasi jaringan irigasi * Pemeliharaan rutin/berkala jaringan irigasi |
| 4 | Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | * Pembangunan embung * Rehabilitasi embung * Pemeliharaan rutin/berkala embung |
| 5 | Pengendalian Banjir | * Perkuatan tebing sungai |
| 6 | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | * Penyediaan prasarana dan sarana air minum * Pembangunan saluran drainase |
| 7 | Perencanaan Tata Ruang | * Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan |
| 8 | Pemberdayaan Jasa Konstruksi | * Pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi |

*Sumber : Renstra, DPUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2018*

1. **Capaian Kinerja Infrastruktur dalam RPJMD 2013-2018**

Capaian kinerja Infrastruktur seperti dimanatkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018 kepada Dinas PUPR NTB ada 2 (dua) Indikator Kinerja Daerah (IKD), yaitu:

1. Kemantapan Jalan provinsi akhir tahun 2018 mencapai 83,65 persen dari rencana 83,65 persen target RPJMD, sementara kemantapan jalan nasional tahun 2018 telah mencapai target 99,98 persen. Jalan provinsi dengan total panjang 1.484,43 Km dengan panjang jalan yang sudah Hotmix sebesar 1.241,75 Km, sehingga dari rencana 83,65 persen dari target yang tertuang dalam RPJMD, capaian kinerja sudah tercapai dengan ratio tingkat capaian kinerja 100,00 persen (%) namun upaya perbaikan kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Capaian Indikator Kinerja Daerah aspek jalan provinsi kondisi Mantap sebagaimana pada gambar 3.1.
2. Peningkatan capaian pelayanan sistem penyediaan prasarana dan sarana air bersih (SPAM) pada setiap tahunnya dapat tercapai, melihat trend anggaran APBN (untuk perkotaan) terhadap program ini terus meningkat. Capaian Indikator Kinerja Daerah aspek cakupan air bersih Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana pada gambar 3.2.

Tabel 3.2.

Indikator Kinerja Daerah Tehadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTB

Berhubungan dengan Infrastruktur PUPR Provinsi NTB

| No | Aspek/Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal 2013 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir 2018 | SKPD Pengelola | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2018** | **2018** |
| Utama | | Pendukung |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** |
| **A** | **Apek Kesejahteraan Masyarakat** | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 5,38 | 5,30 | 5,19 | 5,03 | 4,28 | 4,55 | 4,55 | Disnakertrans | | Seluruh SKPD |
| 2 | Angka kemiskinan | % | 17,25 | 16,25 | 15,25 | 14,25 | 13,25 | 12,25 | 12,25 | BPMPD | | Semua SKPD |
| 3 | Pertumbuhan PAD | % | 15,14 | 13,78 | 13,64 | 15,06 | 16,58 | 18,34 | 18,34 | Dispenda | | Seluruh SKPD |
| 4 | Kunjungan Wisatawan | Org | 1.357.602 | 1.500.000 | 1.650.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | Disbudpar | | Seluruh SKPD |
| * mancanegara | Org | 565.944 | 600.000 | 700.000 | 850.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| * nusantara | Org | 791.658 | 900.000 | 950.000 | 900.000 | 950.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | % | 1,58 | 1,58 | 1,82 | 2,00 | 2,20 | 2,42 | 2,42 | Dinsosduk  capil | | Seluruh SKPD, |
| **B** | **Aspek Pelayanan umum** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Biro Oganisasi | | Seluruh SKPD |
| 7 | Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online (*RKPD Online, NTB Satu Data, SIPPPID)* | Orang | 4.653 | 25.000 | 85.000 | 155.000 | 230.000 | 300.000 | 300.000 | Biro Umum | | Seluruh SKPD |
| 8 | Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap | % | 67,56 | 68,92 | 72.67 | 72,90 | 75,39 | 83,65 | 83,65 | PUPR | | Dishubkominfo, Bappeda |
| 9 | Cakupan Air Bersih | | | | | | | | | PUPR | | Distamben, Dikes, BLHP, DIshut, BPBD, DIsosdukcapil |
| * Perkotaan | % | 80,23 | 82,18 | 83,53 | 84,87 | 86,22 | 87,56 | 87,56 |
| * Perdesaan | % | 72,15 | 75,12 | 76,81 | 78,50 | 80,18 | 81,87 | 81,87 |
| **C** | **Aspek Daya Saing** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 10 | Jumlah penumpang angkutan udara dan laut | | | | | | | | | |  | PUPR |
| * Angkutan udara | Org | 2.145.290 | 2.451.000 | 2.843.000 | 3.298.000 | 3.476.000 | 3.626.000 | 3.626.000 | Dishub kominfo | |
| * Angkutan laut | Org | 125.794 | 138.373 | 153.594 | 172.025 | 197.828 | 227.502 | 227.502 |
| 11 | Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |  | Kehutanan  Dishutkominfo, Dinas PUPR |
| * Air |  | 54,00 | 53,50 | 54,00 | 54,20 | 54,30 | 54,50 | 54,50 | BLHP | |
| * Udara |  | 86,20 | 86,22 | 86,23 | 86,25 | 86,26 | 86,28 | 86,28 |
| * Tutupan lahan | % | 61,74 | 62,41 | 62,86 | 63,33 | 63,79 | 64,26 | 64,26 |
| 12 | Mata Air Terlindungi | Titik | 334 | 354 | 375 | 396 | 417 | 438 | 438 | BLHP | | Dishut, PUPR, Disbudpar |

*Sumber : Review RPJMD 2013 - 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat*

Tabel 3.3.

Realisasi Capaian Kinerja Terhadap RPJMD Tahun 2013-2018

| NO | PROGRAM | TARGET RENSTRA 2013 - 2018 | TARGET RPJMD  2013 - 2018 | INDIKATOR KINERJA | REALISASI CAPAIAN INDIKATOR THD RPJMD 2013-2018 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA. 2013 | TA. 2014 | TA. 2015 | TA. 2016 | TA. 2017 | TA. 2018 |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **Urusan : Pekerjaan Umum** | **2,802,088,608,508** | **3,113,397,464,295** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 860,621,336,598 | 1,015,616,815,819 | Jaringan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%) | 65.78 | 68.99 | 72.37 | 72.10 | 77.16 | 83.65 |
| 2 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 1,093,904,942,381 | 1,277,503,021,527 | Jaringan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%) | 65.78 | 68.99 | 72.37 | 72.10 | 77.16 | 83.65 |
| 3 | Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan | 1,123,349,000 | 1,336,750,000 | Rencana program (Dokumen) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | 1,434,761,237 | 2,006,531,210 | Umur teknis alat berat (%) | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 |
| 5 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 166,592,248,830 | 245,124,431,970 | Cakupan areal irigasi (Ha) | 71,115.00 | 68,902.00 | 96,138.00 | 65,155.00 | 87,310.00 | 45,895.00 |
| 6 | Program Pengembangan; Pengelolaan dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Air Lainnya | 96,535,727,237 | 72,124,066,880 | Cakupan areal irigasi (Ha) | 665.00 | 686.00 | 595.80 | 1,154.58 | 1,054.88 | 1,056.00 |
| 7 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 46,414,131,220 | 70,167,617,680 | Cakupan Air Bersih Perkotaan (%) | 80.23 | 82.09 | 83.25 | 89.95 | 90.65 | 92.66 |
|  |  | 92,809,559,104 | 104,993,013,704 | Cakupan Air Bersih Perdesaan (%) | 72.15 | 74.80 | 75.57 | 78.47 | 80.45 | 82.49 |
| 8 | Program Pengendalian Banjir | 68,090,026,486 | 38,192,811,140 | Luas genangan areal banjir (%) | 13.30 | 16.53 | 17.51 | 25.03 | 21.65 | 23.49 |
| 9 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 93,276,879,154 | 59,479,831,505 | Daya tumbuh wilayah strategis (%) | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | - | - |
| 10 | Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian | 3,087,514,400 | 4,159,825,670 | Sertifikasi hasil uji (jenis) | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 110.00 | 110.00 |
| 11 | Program Pengaturan Jasa Konstruksi | 370,374,600 | 339,436,900 | Daya serap (Orang) | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 |
| 12 | Program Pengawasan Jasa Konstruksi | 4,486,926,300 | 3,554,005,290 | Daya serap (Orang) | 90.00 | 90.00 | 180.00 | 250.00 | 290.00 | 225.00 |
| 13 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum | 270,802,214,000 | 214,817,305,000 | Daya tampung (%) | 2.45 | 15.10 | 35.24 | 60.15 | 86.67 | 92.67 |
| 14 | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan | 474,310,100 | 1,050,000,000 | Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan (%) | - | - | - | - | 2.00 | 15.00 |
| 15 | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor | 468,611,409 | 840,000,000 | Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor (%) | - | - | - | - | 1.00 | 15.00 |
| 16 | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah | 1,336,188,320 | 1,672,000,000 | Data/Informasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (dokumen) | - | - | - | - | 3.00 | 3.00 |
| 17 | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah | 259,508,132 | 420,000,000 | Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah (%) | - | - | - | - | 2.00 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **Urusan : Penataan Ruang** | **5,544,995,523** | **7,915,475,120** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Program Perencanaan Tata Ruang | 3,909,601,771 | 5,514,658,540 | Rencana teknis KSP (Dok.) | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| 2 | Program Pemanfaatan Ruang | 986,776,400 | 1,505,424,240 | Rumusan kebijakan tata ruang (Dokumen) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 648,617,352 | 895,392,340 | Penurunan Penyimpangan tata ruang (%) | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 12.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C.** | **Urusan : Perumahan** | **169,098,362,252** | **212,446,649,352** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Program Pengembangan Perumahan | 169,098,362,252 | 212,446,649,352 | Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Unit) | - | 1,000.00 | 800.00 | 1,008.00 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Sumber : Hasil Analisa dari LKPJ DPUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018*

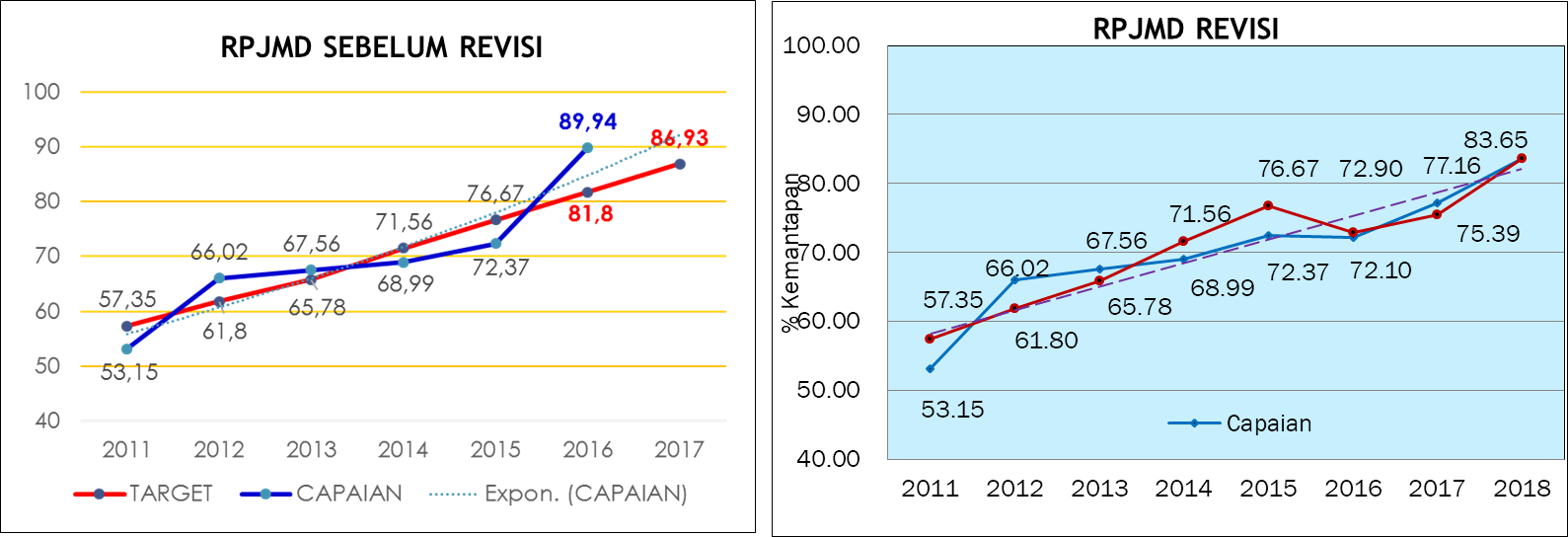
Tabel 3.4.

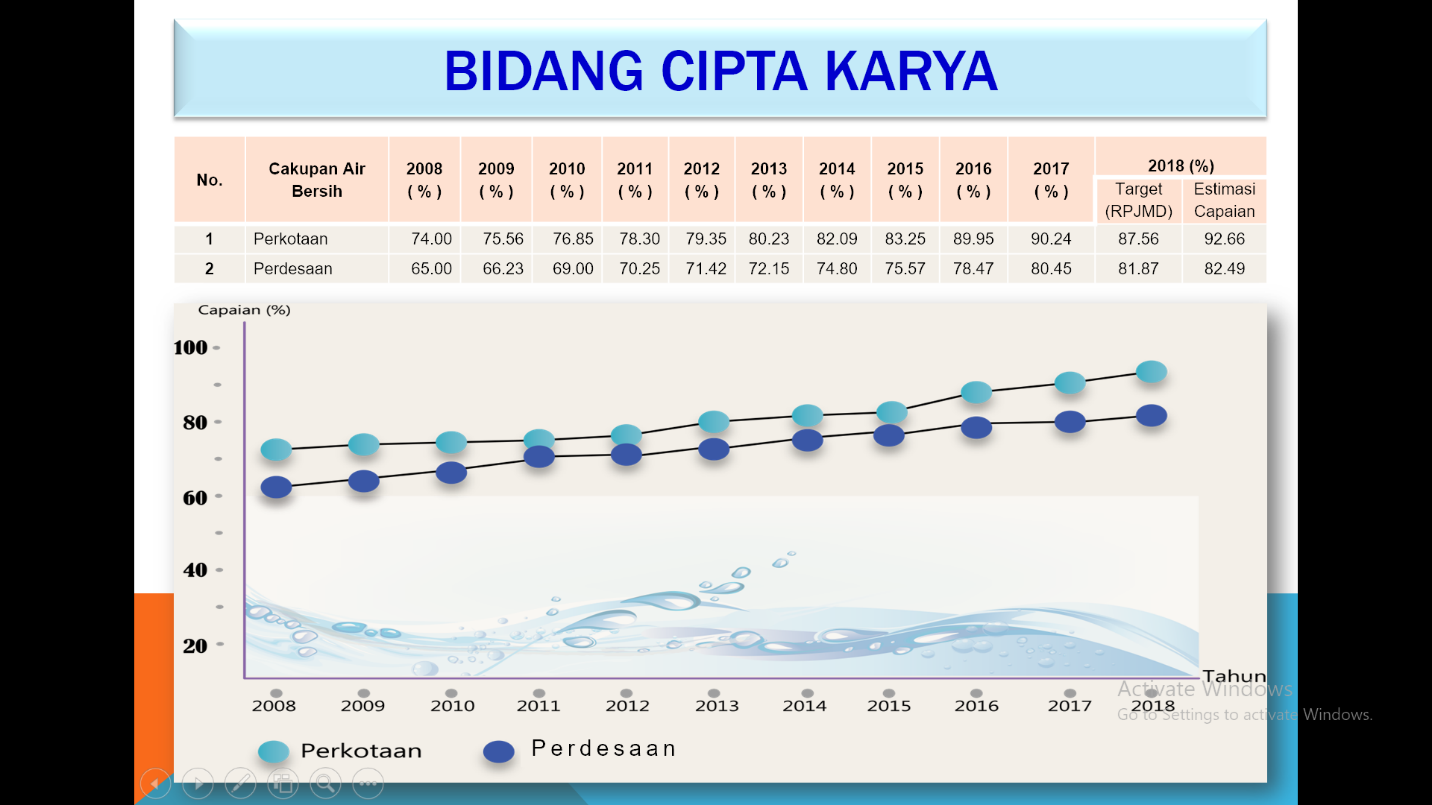
Capaian Indikator Kinerja Daerah urusan Pekerjaan Umum

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Panjang Jalan(Km)** | **Satuan** | **Tahun Awal RPJMD 2013** | **Realisasi 2017** | **Target 2018** | **Realisasi 2018** |
| Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap | 1.484,43 | Km | 1.002,10 | 1.145,36 | 1.241,66 | 1.241,75 |
| % | 67,56 | 77,16 | 83,65 | 83,65 |
| Cakupan Air Bersih |  | Kota (%) | 80,23 | 90,65 | 87,56 | 92,66 |
| Desa (%) | 72,15 | 80,45 | 81,87 | 82,49 |

*Sumber : Hasil Analisa dari LKPJ DPUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018*

Gambar 3.1. Grafik capaian kinerja kemantapan jalan di Provinsi NTB



Gambar 3.2. Grafik capaian kinerja cakupan air bersih/air minum di Provinsi NTB

1. **Capaian Kinerja Infrastruktur PUPR Tahun 2013-2018**

5.1. Bidang Perumahan dan Permukiman (2013-2016)

Dalam kaitan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan serta menurunkan angka proporsi lingkungan perumahan yang kumuh, Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota berupaya terus melakukan penataan perumahan melalui perbaikan kondisi rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni terus menurun dari tahun ke tahun. Sampai dengan periode tahun 2013-2016 masih tersisa sebanyak 311.116 unit. Penanganan rumah tidak layak huni tahun 2013-2016 sebanyak 15.537 unit. Pemerintah NTB terus berupaya menangani rumah tidak layak huni . Selain itu pemerintah juga meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

5.2. Bidang Cipta Karya

Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk, baik di perkotaan maupun pedesaan Kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kesehatan setiap tahunnya meningkat terus sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Pemerintah provinsi NTB secara terus menerus berupaya meningkatkan penyediaan dan pelayanan air bersih dan air minum baik kualitas dan kuantitas. Penyediaan air bersih diperoleh dari berbagai sumber seperti mata air, sumur bor, waduk, bendungan, sumur pompa, sumur gali dan pengelolaaan air dari sungai. Kurun waktu 2014-2017, pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk NTB, baik di perkotaan maupun perdesaan terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata 1,2 sampai 6,7 persen. Hal ini terlihat dari cakupan layanan air bersih perkotaan pada 2013 sebesar 80,23 persen menjadi 92,66 persen pada 2018 dari target RPJMD sebesar 87,56 persen, demikian pula dengan kawasan perdesaan, tahun 2013 dari 72,15 persen meningkat pada tahun 2018 menjadi 82,49 persen dari target 85,00 persen.

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2018, Hibah barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga untuk penyediaan infrastruktur air bersih untuk 44 desa dan Bantuan sosial yang diserahkan untuk masyarakat miskin Prasarana air bersih yang dibangun pada 7 Kab/Kota dan 4 desa, total anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 36.077.759.600. Indikator pencapaian kinerja cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2018 sudah mencapai rasio rata-rata cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2018 mencapai ratio 87,58 persen terdiri atas perkotaan telah mencapai 92,66 persen sedangkan target RPJMD sebesar 86,22 persen (telah melampaui target RPJMD), sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah mencapai 82,49 persen dari target RPJMD sebesar 81,87 persen (telah melampaui target RPJMD). Sedangkan sampai dengan periode 2013-2018 sumber dana APBD, total anggaran yang terserap mencapai Rp. 139.223.600.000,.

Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (fasilitas peribadatan Islamic Centre) mulai pembangunan tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp. 6.733.881.000,- sampai dengan tahun anggaran 2017 telah menyerap total anggaran sebesar Rp. 270.802.214.000,- dengan daya tampung telah mencapai 86,67 % yang akan ditingkatkan sampai dengan 92,67 % pada tahun anggaran 2018-2019 dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp. 45.000.000.000. Pagu anggaran pada RPJMD sebesar Rp. 413.188.000.000,- dianggarkan untuk beberapa bangunan yaitu: Bangunan Masjid, minaret utama masjid, gedung pertemuan, sekolah model islam terpadu (TK, SD, SMP & SMU), pusat kajian agama islam dan perpustakaan/Museum Islam (tidak realisasi).

5.3. Bidang Bina Marga

Pembangunan jalan di Provinsi NTB dilaksanakan untuk menyeimbangkan aksesbilitas antar wilayah dan antar sektor untuk mewujudan pemerataan tingkat kemantapan infrastruktur jalan antar wilayah dan antar sektor. Pemerintah NTB terus berupaya melakukan percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi terutama yang menuju kawasan strategis melalui program percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun JAMAK sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2016 sumber pendanaan dari APBD sebesar Rp. 650.000.000.000,- untuk pembiayaan 12 (dua belas) ruas jalan dengan total panjang jalan sebesar 373,09 Km dan 11 (sebelas) jembatan dengan total panjang sebesar 697 m’, dilaksanakan selama 2 tahun yaitu tahun 2017 – 2018, dengan capaian anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 255.000.000.000,-. Dan dari sumber dana hibah PRIM INDII Australia periode pelaksanaan tahun 2013 – 2017 sebesar Rp. 310.750.000.000,- untuk Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi *(Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM*), yaitu pekerjaan rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan serta mempercepat penanganan jalan strategis nasional sepanjang 202,84 kilometer dengan dukungan dana APBN, dan telah tertangani sepanjang 110,73 kilometer baik di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Selama kurun waktu 2013-2017, kondisi dan tingkat pelayanan jalan menunjukkan kemajuan yang berarti. Itu berlaku baik untuk jalan nasional maupun jalan provinsi. Jalan nasional di NTB sepanjang 632,17 kilometer. Kemantapan jalan nasional di NTB pada tahun 2013 sebesar 72,43 persen menjadi 99,96 persen pada tahun 2017 atau sesuai target RPJMD dan kemantapan jalan Provinsi dalam periode tahun 2014 s/d 2016 tidak tercapai target disebabkan pada tahun 2015 jalan mantap 72,37 persen, pada tahun 2016 turun menjadi 72,10 persen disebabkan antara lain karena panjang jalan Provinsi mengalami pengurangan sepanjang 316,97 Km telah beralih status menjadi jalan Nasional, selain itu juga terjadinya penurunan kualitas akibat bencana alam di beberapa ruas jalan yang rawan terjadinya longsor dan genangan air pada daerah - daerah yang kritis. Namun demikian, upaya perbaikan kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap.

Panjang Jalan Provinsi saat ini adalah 1.484,43 Km dengan tingkat kemantapan telah menunjukan kemajuan secara signifikan dimana sejak Tahun 2011 dengan berbagai program penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya infrastruktur jalan diantaranya, Program Percepatan, Program DAK dan Program Hibah PRIM IndII, kondisi jalan mantap tahun 2011 hanya 53,15 persen. dan di akhir tahun 2017 kondisi kemantapan Jalan Provinsi berubah secara signifikan menjadi 77,16 persen atau panjang jalan mantap + 1.145,36 Km, telah melampaui target RPJMD yaitu 75,39 persen. Pada tahun 2018 perkiraan target capaian dalam Renstra dan RPJMD sebesar 85,65 persen akan tercapai karena anggaran biaya untuk kontruksi kemantapan jaringan jalan provinsi dalam DPA-PD Dinas PUPR Provinsi NTB dan UPTD Jalan tahun 2018 mencapai Rp. 343.453.852.000,- serta masih ada tambahan sisa dana program percepatan pembangunan jalan sebesar Rp. 177.000.000.000 dan sumber dana pembangunan jalan lainnya pada APBD Perubahan tahun 2018. Kemantapan jalan Nasional dan provinsi akan memperlancar konektivitas arus barang dan jasa dalam wilayah Provinsi NTB dan antar wilayah provinsi. Dengan komitmen bersama kelancaran penanganan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, khususnya dalam penyediaan lahan untuk pelebaran dan pembangunan jalan.

5.4. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian yang dikelola pemerintah Provinsi NTB sebanyak 35 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas baku areal irigasi seluas 58.378,50 Ha dan panjang total saluran irigasi 757.422 Km, dilaksanakan melalui pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di Provinsi NTB. Kegiatan pada tahun 2017 antara lain: rehabilitasi/ pemeliharaan Jaringan Irigasi di P. Lombok pada 16 DI dengan panjang saluran 896,12 Km, untuk luas areal irigasi 57.628 Ha dan di P. Sumbawa pada 12 DI sepanjang 11,64 Km dengan luas areal irigasi 29.682 Ha. Pengembangan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan yaitu pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Kering (JILK) system perpipaan pada lahan kering menjadi lahan agrowisata di Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sembalun, Pringgabaya dan Sakra. Kabupaten Bima di Kecamatan Tente.

Pada periode tahun 2013-2018 luas areal irigasi prioritas yang mendapat penanganan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang mengalami penurunan kinerja (tidak optimal) disebabkan adanya bencana alam dan sedimentasi (prioritas) di Pulau Lombok pada 11 (sebelas) Daerah Irigasi, antara lain: DI. Gebong, DI. Sesaot, DI. Bagik Kembar, DI. Gde Bongoh DI. Renggung, DI. Parung, DI. Rutus, DI. Tojang Komplek, DI. Maronggek Komplek, DI. Kali Desa Komplek dan DI. Sambelia. Dengan luas areal irigasi 18.506 Ha. Anggaran terserap dari sumber dana APBD dan dana Hibah (WISMP-II) sebesar Rp. 30.284.236.897,-. Sedangkan 5 (lima) DI. yang ditanggani secara reguler antara lain: DI. Santong, DI. Bisok Bokah, DI. Plapak, DI. Sakra dan DI. Belanting dengan luas areal irigasi 8.448,50 Ha. Anggaran terserap dari sumber dana APBD dan dana Hibah (WISMP-II) sebesar Rp. 15.153.680.911,-. Penganggaran terkecil (<) pada DI. Renggung sebesar Rp. 607.939.774,- dan terbesar (>) pada DI. Kali Desa Komplek sebesar Rp. 7.105.538.167,-.

Sedangkan di Pulau Sumbawa akibat bencana alam dan sedimentasi (prioritas) terdapat 7 (tujuh) DI. Yaitu: DI. Elang Desa, DI. Kalimantong I & II, DI. Daha I & II, DI. Kadindi, DI. Nangakara dan DI. Latonda Pekat dengan total luas areal irigasi yang menjadi normal (optimal) seluas 10.180 Ha. Anggaran terserap dari sumber dana APBD dan dana Hibah (WISMP-II) sebesar Rp. 22.374.965.956,- Sedangkan 12 (dua belas) DI. yang ditanggani secara reguler antara lain: DI. Plampo’o, DI. Beringin Sila, DI. Buer Komplek, DI. Pungkit, DI. Maronge/Tiu Kulit, DI. Marente Komplek, DI. E. Gapit, DI. Semangi, DI. Plara, DI. Madapanga II, DI. Ncangakae-Ncoha dan DI. Sumi-Sape. Dengan anggaran yang terserap dari sumber dana APBD dan dana Hibah (WISMP-II) sebesar Rp. 24.836.799.949,-. Penganggaran terkecil (<) pada DI. E. Gapit sebesar Rp. 333.557.000,- dan terbesar (>) pada DI. Kalimantong II sebesar Rp. 8.006.941.700,-

Total anggaran se-NTB sampai dengan periode tahun 2013-2018 yang terserap dari sumber dana APBD dan dana Hibah (WISMP-II) sebesar Rp. 92.649.683.713,-.

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, Kegiatan Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya, membangun Embung Prode di Desa SP-3, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa secara bertahap periode tahun 2015-2017 dengan bentang bendung 110,00 m’ dan tinggi bendung 7,00 m’, luas genangan 2,5 Ha dan penyediaan air baku 1.764 jiwa atau 372 KK dengan total biaya sebesar Rp. 4.700.000.000,-. Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung kewenangan provinsi di P. Lombok 78 unit Embung, pekerjaan Embung Rakyat yang dihibahkan ke masyarakat 164 unit untuk mengairi 15.600 Ha dan Rehabilitasi Embung kewenangan provinsi P. Sumbawa 2 unit Embung, pekerjaan Embung Rakyat yang dihibahkan ke masyarakat 12 unit untuk mengairi 1.100 Ha. Total anggaran sampai dengan periode 2013-2018 sumber dana APBD sebesar Rp. 96.535.727.700,-.

Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai pada tahun anggaran 2017 pencapaian indikator pembangunan perkuatan tebing sungai sebanyak 4 sungai dengan panjang 2.325 m’ dan rehabilitasi tebing sungai di P. Lombok pada 27 sungai dengan panjang 1.026 m’ dan P. Sumbawa 111 sungai dengan panjang 5.250 m’, total anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 34.123.600.000,-. Sedangkan periode 2013-2018 sumber dana APBD, total anggaran yang terserap mencapai Rp. 68.090.000.000,-.

5.5. Bidang Tata Ruang

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas penataan ruang kawasan strategis provinsi diperlukan tertib penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan pengan pengendalian pemanfaatan ruang telah dilakukan pembinaan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga konsistensi antara rencana Tata Ruang dan implementasi.

Dalam kurun waktu tahun 2015-2018 berdasarkan hasil pengamatan PPNS Tata Ruang setidaknya terjadi 35 indikasi pelanggaran Tata Ruang. Terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, TKPRD telah melakukan koordinasi secara intensif kepada Kabupaten/Kota guna mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan yang lebih banyak lagi.

Dari 16 Kawasan strategis provinsi yang tercantum dalam RTRW Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB, sampai tahun 2018 telah dapat disusun rencana detailnya sebanyak 8 (delapan) KSP yaitu KSP Mataram Metro, KSP Alas Utan, KSP Senggigi Tiga Gili, KSP Kuta, KSP Teluk Bima, KSP Rasimas, Teluk Saleh dan KSP Pototano. Selain itu dilakukan pula fasilitasi penyusunan rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Pada tahun 2018 tim teknis tata ruang melaksanakan perbaikan RTR KSP Kuta dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil analisa bidang Tata Ruang yang dilakukan dapat diambil beberapa poin penting, diantaranya :

1. Bahwa perkembangan pembangunan di wilayah provinsi yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi disatu sisi berjalan sangat cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, pada sisi lain sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial-budaya. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup wilayah provinsi, yang perencanannya dituangkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Materi RTRWP; pertama agar mampu mewujudkan satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis atau dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan; kedua tetap mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan kearifan lokal.
2. Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dengan kegiatan manusia, baik kehidupan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah terdiri atas lokasi dan besaran kegiatan tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan, demikian juga suatu kegiatan tertentu berlokasi pada beberapa alternatif ruang.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka peratuan parundang undangan tersebut menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada :

1. Berdasarkan pendekatan fungsional, RTRW Provinsi merupakan :

1. Penjabaran Spasial Rencana Jangka Panjang Pembangunan wilayah provinsi.
2. Alat koordinasi pembangunan pada tingkat provinsi dengan tujuan menghindari benturan kepentingan antar sektor.
3. Acuan penyusunan rencana spasial jenjang bawahannya.

2. Berdasarkan pendekatan konsepsional, RTRW Provinsi merupakan upaya untuk :

1. Menjabarkan Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang dan Struktur Ruang
2. Meningkatkan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historis menguntungkan, agar terjadinya kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lainnya.
3. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah.
4. Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pelayanan yang ada
5. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya.
6. Mendorong serta mengembangkan pusat-pusat permukiman yang pertumbuhannya lamban, untuk dapat merangsang pertumbuhan wilayah bersangkutan dan wilayah disekitarnya.
7. Mengembangkan pusat-pusat permukiman orde terendah terdiri atas peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi.
8. Mengoptimalkan daya guna wilayah (development posibility) tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak ditetapkan secara kaku.
9. Mencapai tujuan pembangunan.
10. Kecepatan perkembangan kegiatan manusia sebagai akibat keberhasilan pembangunan, belum segera dapat tertampung dalam wujud tata ruang yang serasi dan optimal, hal ini disebabkan oleh karena sifat kaitan fungsional antara ruang yang tak dapat terwujud secepat perkembangan masing-masing kegiatan manusia.

Oleh karena itu perlu dibuat terlebih dahulu rancangan tata ruang, yang dapat menampung segenap kemungkinan perkembangan selama kurun waktu 20 tahun.

1. Sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan terdiri atas penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Rencana Rinci Tata Ruang yakni Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi beserta pengaturan Zonasi yang lebih rinci dan lebih teknis.
2. TELAAHAN TERHADAP PERENCANAAN PERIODE 5 TAHUNAN
   1. Umum

Sesuai Stategi dan Kebijakan, untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB guna mencapai tujuan dan saran yang sudah ditetapkan dalam rangka mngatasi permaalahan pembangunan di Provinsi NTB khusunya kesenjangan antar wilayah dan antar sector. Maka secara umum Strategi dan Kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis seta prospek pembangunan tahun 2013 -2018 yang ditempuh adalah melaksanakan percepatan pembangunan insfrastruktur strategis, salah satunya misi adalah melaksanakan percepatan penataan ruang kawasan stategis provinsi untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Keterkaitan Isu Strategis dan Kebijakan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah | Tersedianya rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi | Pembuatan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) | Mempercepat penyelesaian peraturan perundang undangan |
|  |  |  |  |  |

* 1. Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Tata Ruang

Dalam kurun waktu Bidang Tata Ruang Menargetkan 8 Penyusunan dokumen Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari 16 KSP menurut Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Rncana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perencanaan Tata Ruang KSP sesuai dengan Rencana dalam waktu 5 tahun (2013-2018) sejumlah:

Target

1. Tahun 2014 = 1 Wilayah KSP
2. Tahun 2015 = 1 Wilayah KSP
3. Tahun 2016 = 2 Wilayah KSP
4. Tahun 2017 = 2 Wilayah KSP
5. Tahun 2018 = 2 Wilayah KSP

Dengan Jumlah Anggaran Sebesar = Rp. 5.514.659.000,- ( Lima Milyar Lima Ratu Empat Bela Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

* 1. Realisasi Program Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Tata Ruang

Dari hasil evaluasi Target ke 8 KSP yang direncanakan telah terealisasi dan direalisasikan sebagai berikut :

1. Tahun 2014 = 0 Wilayah KSP
2. Tahun 2015 = 5 Wilayah KSP, trdiri dari :
3. KSP Mataram Metro
4. KSP Alas Utan
5. KSP Senggigi Tiga Gili
6. KSP Kuta dan sekitarnya dan;
7. KSP Teluk Bima
8. Tahun 2016 = 2 Wilayah KSP
9. KSP Rasimas ( Sakra, Sikur dan Masbagik)
10. KSP Teluk Saleh
11. Tahun 2017 = 1 Wilayah KSP
12. KSP Poto Tano
13. Tahun 2018 = 0 Wilayah KSP

Dari hasil analisa bahwa Tujuan, sasaran dan Strategi untuk program 5 tahunan telah tercapai namun Kebijakan yang telah ditetapkan yaitu Mempercepat penyelesaian peraturan perundang undangan, dari 8 (delapan) dokumen perencanaan belum satupun ditetapkan dengan Perda.

* 1. Kawasan Prioritas yang dikembangkan

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
2. Kasan Samota (Teluk Saleh, Moyo dan Tambora)

Untuk Mendukung kedua Kawasan Prioritas yang akan dikembangkan dan saat ini pembangunannya sedang berjalan. diharapkan untuk menunjang dan memenuhi secara aturan perundang-undangan (aspek hukum), maka KSP KSP yang mencakup kedua Kawasan Prioritas tersbut untuk segera ditetapkan dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Antara lain :

1. KSP Kuta
2. KSP Poto Tano sebagai wilayah penyangga
3. KSP Alas Utan sebagai wilayah penyangga
4. KSP Teluk Saleh